

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang harus dilakukan pada bab ini yaitu melihat rujukan pada penelitian sebelumnya, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dipandang relevan dan dapat dijadikan pendukung dalam penelitian ini:

1. **Komang Fridagustina Anantara (2013)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan pada CSR, pengaruh struktur kepemilikan pada nilai perusahaan, dan pengaruh CSR pada nilai perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan dan CSR, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan CSR. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2010. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, dan sampel yang digunakan sebanyak 47 sampel. Model statistik yang digunakan adalah metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan saham berpengaruh terhadap CSR adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan publik. Struktur kepemilikan baik kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik tidak berpengaruh

terhadap nilai perusahaan, dan variabel CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Persamaan :

Sama-sama menggunakan variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan CSR . Sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*.

Perbedaan :

Penelitian terdahulu menggunakan independen kepemilikan manajerial, kepemilikan isntitusional, kepemilikan publik, dan CSR sedangkan penelitian saat ini menggunakan independen struktur kepemilikan, *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*.

2. **Priyatna Bagus S. dan Imam Subekti (2013)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris, adanya pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* yang dibagi menjadi empat proksi yaitu: 1) Kepemilikan manajerial, 2) Kepemilikan institusional, 3) komisaris independen, 4) komite audit. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 2010-2011.

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode *proportional stratified random sampling* yaitu metode proses pengambilan sampel dilakukan dengan membagi populasi menjadi subpopulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility*, komite audit dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan komisaris independen dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Persamaan :

Sama-sama menggunakan variabel independen *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan.

Perbedaan :

Penelitian terdahulu menggunakan metode *proportional stratified random sampling*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *purposive sampling*.

3. Dwi Sukirni (2012)

Penelitian ini ingin menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan deviden, dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan deviden, dan kebijakan hutang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008-

2010. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, dan kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan pada variabel kepemilikan institusional dan kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Persamaan :

Sama-sama menggunakan variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*.

Perbedaan :

Penelitian terdahulu menggunakan independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan deviden, dan kebijakan hutang, sedangkan penelitian saat ini menggunakan independen struktur kepemilikan, *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*.

4. Miranty Nurhayati (2012)

Penelitian ini ingin menguji analisis pengaruh kinerja keuangan, *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 pada tahun 2009-2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan, *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai Perusahaan, sedangkan variabel

independen yang digunakan adalah kinerja keuangan, *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*. Populasi penelitian ini merupakan perusahaan yang termasuk kategori LQ45 yang terdaftar di BEI. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau tidak acak, agar diperoleh sampel yang tegas dengan penelitian yang dilakukan dan metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return on equity* (ROE) mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Persamaan :

Sama-sama menggunakan variabel penelitian nilai perusahaan, menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan, sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan metode analisis regresi linier berganda.

Perbedaan :

Penelitian terdahulu menggunakan independen *return on equity*, *corporate social responsibility* dan *good corporate governance*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan independen struktur kepemilikan, *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*.

5. Reny Dyah Retno dan denies priantinah (2012)

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris apakah *good corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan leverage pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, sedangkan variabel Independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* dan tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, studi pustaka, dan *literature*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan *good corporate governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol *size* dan *leverage* pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010, pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol *size*, jenis industri, profitabilitas, dan *leverage* pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010, *good corporate governance* dan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Persamaan

Sama-sama menggunakan variabel independen *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* dan variabel dependen nilai perusahaan.

Perbedaan :

Penelitian ini menggunakan semua sampel yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel barang konsumsi.

6. Sri Sofyaningsih dan Pancawati (2011)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan deviden, kebijakan hutang, terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan sampel yang digunakan sebanyak 115 dengan kriteria perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang sudah diaudit yang dipublikasikan di *Indonesian Capital Market Directory* dan *data base* BEI periode 2007-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan kinerja perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, kebijakan deviden dan kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Persamaan :

Sama-sama menggunakan variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial kepemilikan institusional. Sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*.

Perbedaan :

Penelitian terdahulu menggunakan independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan deviden, kebijakan hutang, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan kinerja perusahaan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan independen struktur kepemilikan, *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Agency Theory*. Menurut Ikhsan (2008: 76) teori agensi mengarah pada hubungan agensi, pemilik (*principal*) yang memberi mandat pada pekerja (*agent*). Munculnya teori keagenan karena adanya individu-individu yang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri sehingga terkadang mengabaikan kepentingan perusahaan. Teori agensi bertujuan untuk (1) menyelesaikan masalah agensi yang muncul ketika adanya konflik tujuan antara prinsipal dan agen serta kesulitan prinsipal melakukan verifikasi pekerjaan agen, (2) menyelesaikan masalah pembagian resiko yang muncul ketika prinsipal dan agen memiliki perilaku berbeda terhadap setiap resiko. Secara keseluruhan, teori agensi mengikat janji perilaku kooperatif, tetapi dengan tujuan yang berbeda dan perilaku yang berbeda dalam menghadapi resiko.

Ketika pemilik (manajer) mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan pada pihak lain, seperti hubungan pemegang saham dan manajer, akan efektif selama manajer mengambil keputusan investasi yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham. Namun, ketika kepentingan manajer berbeda dengan kepentingan pemilik, keputusan yang diambil oleh manajer kemungkinan

besar akan mencerminkan preferensi manajer dibandingkan dengan pemilik. Para pemilik perusahaan ingin memaksimalkan nilai saham perusahaan (Ikhsan, 2008:78).

Ketika manajer memiliki sejumlah besar saham perusahaan, mereka akan memilih strategi yang dapat menghasilkan nilai saham perusahaan. Namun terkadang manajer lebih memilih strategi yang akan meningkatkan keuntungan pribadi mereka dan bukan kepada pemilik, perilaku manajer ini dapat menyebabkan penurunan kinerja saham. Perilaku manajer yang ingin menguntungkan dirinya sendiri sesuai dengan teori keagenan, manajer yang egois bertindak dengan cara-cara yang meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dengan mengorbankan keuntungan pemegang saham (Ismail, 2008).

Menurut Ismail (2008:119) berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan tertumpu pada teori agensi dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan adanya biaya yang disebut sebagai *agency cost* yang mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan transparan, termasuk biaya audit yang independen serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham karena adanya pemberian opsi dan berbagai manfaat yang diberikan kepada manajemen oleh pemegang saham dengan tujuan menyalurkan kepentingan pemegang saham dengan manajemen.

Teori agensi muncul berdasarkan adanya keinginan pemisahan antara pemilik perusahaan (pemegang saham/*owner*) dengan para manajer yang mengelola perusahaan. Bukti empiris menunjukkan bahwa para manajer tidak selamanya bertindak sesuai dengan kepentingan para pemilik perusahaan, melainkan seringkali terjadi bahwa para pengelola perusahaan (direksi dan manajer) bertindak mengejar kepentingan mereka sendiri (Ismail, 2008:119-120).

2.2.2 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi adalah teori yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut Ismail (2008:130) program *corporate social responsibility* juga dapat diimplementasikan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap perusahaan. Dalam hal ini, operasi perusahaan bisa saja menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat disekitarnya dan perusahaan melaksanakan aktivitas *corporate social responsibility* justru untuk meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap keberadaan perusahaan.

The principle of legitimacy, prinsip ini didasari oleh adanya legitimasi dan pemberian kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pelaku bisnis untuk menjalankan operasi perusahaan, menggunakan berbagai jenis sumber daya, serta memasarkan produk yang mereka hasilkan. Jangka panjangnya, perusahaan yang menggunakan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab menurut kacamata masyarakat, akan cenderung kehilangan legitimasinya dari masyarakat. Bentuk hilangnya legitimasi masyarakat dapat berkisar dari tidak mengkonsumsi produk yang dihasilkan perusahaan (misalnya, hal ini terjadi pada saat perusahaan

penyedap masakan Ajinomito menggunakan *bacto soyton*) atau desakan masyarakat agar perusahaan menghentikan operasinya sama sekali. Prinsip ini diterapkan pada tingkat institusi industri dan dianggap sebagai kewajiban generik perusahaan terhadap masyarakat (Ismail 2008:108). Menurut Nor (2010:92) meningkatkan tanggung jawab sosial di masyarakat juga memiliki manfaat untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga image dan strategi perusahaan.

2.2.3 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah proses pengendalian yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa manajemen perusahaan bertindak sejalan dengan kepentingan para pemilik perusahaan (pemegang saham). Struktur kepemilikan menunjukkan bahwa variabel-variabel penting didalam struktur modal yang tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan ekuitas, tetapi ditentukan juga oleh presentasi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik (Jensen dan Meckling, 1976).

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial ditandai dengan adanya kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki pihak manajemen yang ikut berpartisipasi aktif di dalam pengambilan keputusan. Menurut Priyatna (2012), kepemilikan manajerial dijelaskan melalui sudut pandang pendekatan keagenan. Pendekatan keagenan menganggap bahwa struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Kepemilikan

manajerial dalam perusahaan meningkat, maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen ikut merasakan manfaat dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian jika keputusan yang diambil salah (Priyatna, 2012).

Menurut Ismail (2008:81) *agency theory* menyatakan bahwa manajer perusahaan bertindak sebagai agen dari pemilik perusahaan. Dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan, manajer dapat bertindak mewakili kepentingan pribadinya atau mewakili kepentingan para pemegang saham. Kesalahan yang biasanya mengemuka pada saat manajer membuat keputusan adalah apakah keputusan-keputusan yang mereka buat akan memiliki dampak yang menguntungkan bagi reputasi mereka sebagai manajer. Reputasi sangat penting, mengingat manajer menghadapi resiko usaha seperti: perusahaan bisa saja mengalami kegagalan, perusahaan bisa hilang karena dimerges dengan perusahaan lain, atau strategi perusahaan mengalami perubahan. Dalam hal tersebut, manajer memiliki resiko kehilangan pekerjaannya, tidak seperti para pemegang saham yang dapat melakukan pengelolaan resiko melalui diversifikasi investasi, manajer tidak bisa melakukan diversifikasi pekerjaan mereka. Salah satu cara mencegah resiko kehilangan pekerjaan adalah melalui aktifitas menjaga reputasi yang akan menjadikan manajer tersebut tampak baik dimata investor maupun publik. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menggunakan :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham yang dimiliki oleh manajemen}}{\text{Saham yang beredar}}$$

2. Kepemilikan Institusional

Menurut Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain, yaitu kepemilikan oleh perusahaan lain, bank, dan institusi lainnya. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat memberikan pengawasan lebih besar yang dilakukan oleh pihak investor institusional, sehingga dapat meminimalkan tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer, hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis, sehingga tidak mudah terpecah oleh tindakan yang memanipulasi keuntungan sepihak.

Komunitas bisnis menaruh perhatian yang besar untuk meningkatkan kepemilikan institusional, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Industri dengan kepemilikan saham yang relatif besar dalam perusahaan akan mempercepat manajemen perusahaan untuk menyajikan pengungkapan secara sukarela (Dyah dan Erman, 2009). Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Saham yang beredar}}$$

3. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat atau publik. Semakin besar kepemilikan saham oleh publik maka akan semakin besar mekanisme pengendalian terhadap perilaku manajemen, dengan kata lain meningkatnya kepemilikan saham oleh publik akan disertai dengan semakin besarnya peluang terpilihnya dewan direksi dari luar, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Komang, 2013). Kinerja perusahaan yang baik merupakan salah satu pemicu meningkatnya nilai perusahaan, kepemilikan publik diukur dengan menggunakan:

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{Saham yang dimiliki oleh publik}}{\text{Saham yang beredar}}$$

2.2.4 Mekanisme *Good corporate governance*

Menurut Muh. Arief (2011:1) bank dunia (*world bank*) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Menurut Ismail (2008:125) Implementasi *good corporate governance* akan dilaksanakan dengan berhasil jika memiliki sejumlah prinsip. Menurut pedoman umum *good corporate governance* Indonesia, *good corporate governance* memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*). Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil cara untuk mengungkapkan

tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*). Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibilitas (*Responsibility*). Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. Independensi (*independency*). Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Vairness*). Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pentingnya penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan seperti: dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan perusahaan yang lebih baik, perusahaan akan mudah mendapatkan dana yang lebih murah karena adanya faktor kepercayaan dari investor dan pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan. Pada kenyataannya penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan bukan hal yang mudah, karena pada pandangan teori keagenan terdapat pemisah antara agen dan prinsipal yang mengakibatkan terjadinya konflik antara pemilik dan pemegang saham, adanya konflik tersebut di dalam perusahaan dapat menurunkan nilai perusahaan (Priyatna, 2013). Kondisi tersebut membutuhkan adanya mekanisme pengendali yang dapat mengatasi perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak.

1. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugas komite audit adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Muh. Arief, 2008:25). Menurut Muh. Arief (2008:33) perihal keanggotaan komite audit disebutkan bahwa:

1. Komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang, termasuk ketua anggota komite audit.

2. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya satu orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan yang tercatat sekaligus menjabat sebagai ketua komite audit.
3. Anggota komite audit lainnya berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi, maupun karyawan dari perusahaan tercatat tersebut.

Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas. Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan manapun dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan (Ismail,2008:34). Komite audit diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan sehingga laporan yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Komite audit dapat diukur dengan menggunakan jumlah komite audit yang ada dalam masing-masing perusahaan sampel.

2. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengelolaan perusahaan. Menurut Muh. Arief (2009:19) lemahnya pengawasan

yang independen dan terlalu besar kekuasaan eksekutif telah menjadi sebagian penyebab tumbangya perusahaan-perusahaan di dunia. Selain itu lemahnya pengawasan terhadap manajemen juga diindikasikan sebagai salah satu penyebab krisis finansial di Asia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemberdayaan komisaris dengan cara memperkenalkan komisaris independen yang diharapkan akan menjadi penggerak *good corporate governance* telah menjadi bagian dari reformasi kehidupan bisnis di Indonesia pascakrisis.

Menurut Muh. Arief (2009:19), dalam kaitannya dengan implementasi *good corporate governnace* diperusahaan, diharapkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum (yuridis), oleh karena itu, peranan komisaris independen sangatlah penting, namun dalam praktik yang selama ini terjadi di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa komisaris sering kali melakukan intervensi terhadap direksi yang enggan membagi wewenang serta tidak memberikan informasi yang memadai kepada komisaris. Selain itu terdapat kendala yang cukup menghambat kinerja komisaris yaitu masih lemahnya kompetensi dan integritas mereka. Hal ini dapat terjadi karena pengangkatan komisaris hanya didasarkan pada penghargaan, hubungan keluarga, atau hubungan dekat lainnya. Permasalahan yang terjadi akan menjadi dasar dalam *agency theory*, yaitu terdapat konflik kepentingan antara direksi dan komisaris independen, dalam hal ini komisaris independen seharusnya mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan. Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam pengertian ini komisaris harus mampu

melaksanakan tugas mereka secara independen dan semata-mata demi kepentingan perusahaan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan, komisaris independen harus selalu meningkatkan kemampuan dan mengembangkan profesionalisme agar mereka dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penambahan nilai perusahaan (Muh. Arief 2009:20). Komisaris independen dapat diukur dengan menggunakan jumlah komisaris independen yang ada dalam masing-masing perusahaan sampel.

2.2.5 *Corporate social responsibility* (Tanggung Jawab Sosial)

Menurut Hendrik (2008:1) *corporate social responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Meningkatkan nilai perusahaan turut ikut meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus menyisihkan keuntungan tersebut kepada masyarakat dan lingkungannya, melalui tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dituangkan dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan nama *corporate social responsibility* (Kasmir, 2010:9). Menurut Kasmir (2010:9), ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat meliputi hal-hal berikut:

1. Perlindungan konsumen (*product safety*), bahwa produk yang diberikan atau dijual kepada masyarakat harus menjamin aman

untuk dikonsumsi. Hal ini berarti perusahaan memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan gizi masyarakat, bahkan peningkatan kesehatan masyarakat.

2. Pengendalian populasi (*pollution control*), dalam hal ini bahwa kegiatan perusahaan tidak akan merusak lingkungan, baik terhadap air, tanah, maupun udara. Keterlibatan perusahaan dituntut untuk mengontrol dan mengatasi terhadap masalah lingkungan yang mungkin atau telah terjadi akibat aktivitas perusahaan.
3. *Reinvest profit*, perusahaan perlu melakukan investasi dari laba yang mereka peroleh kepada dunia pendidikan, pemberdayaan masyarakat sekitar usaha serta dukungan terhadap pelestarian lingkungan alam.

Semakin banyak bentuk tanggung jawab oleh perusahaan yang dilakukan terhadap lingkungannya, nama baik perusahaan tersebut akan meningkat. Investor akan lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra baik dimasyarakat karena semakin baik citra perusahaan, loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga dalam waktu lama penjualan perusahaan akan membaik dan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Perusahaan tersebut akan berjalan lancar dan nilai saham dari perusahaan tersebut meningkat dan dapat meningkatkan legitimasi dari masyarakat. Pengukuran pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu dengan pemberian score yaitu:

Score0 : Jika perusahaan tidak mengungkapkan item daftar pertanyaan.

Score1 : Jika perusahaan mengungkapkan item pada daftar pertanyaan.

Pengukuran kemudian dilakukan berdasarkan indeks pengungkapan pada masing-masing perusahaan dengan jumlah semua item yang mungkin diungkapkan, dan dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{Pengungkapan CSR} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item yang ditetapkan GRI}}$$

2.2.6 Nilai Perusahaan

Tujuan utama sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pengertian nilai perusahaan berbeda-beda menurut para ahli, menurut Saud, (2006:5) bagi perusahaan yang belum *go publik* nilai perusahaan merupakan jumlah biaya yang bersedia dikeluarkan oleh calon pembeli jika perusahaan tersebut dijual, sedangkan bagi perusahaan yang sudah *go publik* nilai perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai saham yang ada di pasar modal.

Tujuan perusahaan yang ingin memaksimalkan nilai perusahaan memiliki banyak kelemahan, menurut (Agus, 2001 :7) kelemahan tersebut antara lain:

- a. Standar ekonomi mikro dengan memaksimalkan profit adalah bersifat statis karena tidak memperhatikan dimensi waktu, sehingga tidak ada perbedaan antara profit jangka panjang maupun jangka pendek.
- b. Pengertian profit itu sendiri, apakah memaksimalkan jumlah profit secara nominal atau secara tingkat profit.
- c. Menyangkut resiko yang berkaitan dengan setiap alternatif keputusan, memaksimalkan profit tanpa memperhitungkan tingkat resiko merupakan kesalahan fatal.

- d. Memaksimalkan profit bisa saja dilakukan dengan menanamkan modal hasil penjualan saham melalui deposito, namun pemegang saham akan meminta tingkat keuntungan yang lebih besar dari tingkat deposito atas resiko yang lebih besar, sehingga harga pasar saham menurun akibatnya nilai perusahaan juga ikut menurun.

Dari kelemahan tersebut maka nilai perusahaan adalah bentuk memaksimalkan tujuan perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para pemegang saham, kemakmuran pemegang saham meningkat apabila harga saham yang dimiliki perusahaan juga meningkat (Agus, 2001:8). Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang harus dicapai perusahaan, tercermin dari harga pasar saham, karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang ditransaksikan di bursa untuk perusahaan yang sudah *go publik*. Proses memaksimalkan nilai perusahaan akan memunculkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang sering disebut *agency problem*. Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan para pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang bisa disebut *agency conflict*, hal tersebut karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan

keuntungan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Kekayaan pemegang saham dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi. Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. Rasio ini dapat dirumuskan dengan menghitung :

$$Q = \frac{(EMV+D)}{(EBV+D)}$$

Keterangan :

Q = Nilai Perusahaan

EMV = *Closing price* x Jumlah saham yang beredar

EBV = Nilai Buku dari Total Ekuitas

D = Nilai Buku dari Total Hutang

2.2.7 Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan

Kepemilikan mengarah pada kekuasaan untuk melakukan kontrol dalam suatu perusahaan dengan menetapkan kebijakan dan tindakan pada perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa pengaruh struktur kepemilikan dan *corporate control* terhadap struktur modal akan menjadi perhatian khusus dengan pertimbangan dalam sistem ekonomi modern. Banyak perusahaan yang tidak dikelola oleh pemiliknya, melainkan dikelola oleh manajer profesional yang diberi kompensasi untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik. Hal tersebut akan memungkinkan untuk mengakibatkan adanya permasalahan keagenan (*agency problem*) maupun asimetri informasi.

Masalah keagenan muncul saat agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal tetapi lebih kepada kepentingan pribadi. Adanya struktur kepemilikan ini diharapkan dapat mengurangi konflik antara agen dengan prinsipal. Semakin banyak kepemilikan saham, maka pengawasan yang dilakukan pemilik terhadap manajemen akan semakin efektif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian Sri (2011), Dwi (2012) dan Komang (2013), menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Teori keagenan (*agency theory*) memunculkan argumentasi tentang konflik antara pemilik yaitu pemegang saham dengan manajer. Konflik tersebut muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Kepemilikan manajerial (*insider*) kemudiandipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik tersebut. Dalam hal ini kepemilikan manajerial dipandang dapat menyamakan kepentingan antara pemilik dan manajer, sehingga semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajerial, maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen ikut merasakan manfaat dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian jika keputusan yang diambil salah. Bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan ditunjukkan oleh Sri (2011) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Shleifer dan Vishny (1986) dalam Diah (2009) berpendapat bahwa kepemilikan institusional dalam tingkat proporsi yang cukup besar akan berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan. Dasar argumentasi ini adalah semakin besar presentase saham yang dimiliki oleh institusional maka pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku manajer dan mengurangi *agency cost*. Kepemilikan institusional meningkat, maka akan menjadikan fungsi pengawasan berjalan secara efektif dan manajemen semakin berhati-hati dalam memperoleh dan mengelola dana pinjaman (utang), karena jumlah utang yang semakin meningkat akan menimbulkan *financial distress*. Terjadinya *financial distress* akan mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan ditunjukkan oleh penelitian Dwi (2012) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Kepemilikan publik merupakan presentase saham yang dimiliki oleh masyarakat atau publik. Semakin besar kepemilikan saham oleh publik maka akan semakin besar mekanisme pengendalian terhadap perilaku manajemen, jika pengendalian yang dilakukan terhadap perilaku manajemen baik, maka akan dapat mengurangi konflik keagenan. Dengan kata lain, meningkatnya pemilik saham publik akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Kinerja yang semakin baik merupakan salah satu pemicu meningkatnya nilai perusahaan. Adanya kepemilikan publik maka aktivitas monitoring terhadap manajemen diharapkan

semakin efektif. Hasil penelitian Komang (2013), menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap nilai perusahaan

2. Pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan

Teori keagenan menyatakan bahwa agen lebih cenderung mementingkan dirinya sendiri dari pada meningkatkan nilai perusahaan. Permasalahan agensi ini akan mengindikasikan bahwa nilai perusahaan akan naik apabila perusahaan dapat mengendalikan perilaku manajer. *Good corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Bukti empiris mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan di tunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Reny dan Deanis (2012) yang membuktikan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pengaruh *good corporate governance* antara lain komite audit dan komisaris independen terhadap nilai perusahaan akan dijabarkan lebih lanjut. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti menjaga agar dapat tercipta sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta terlaksana *good corporate governance*. Komite audit diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan sehingga laporan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat dipercaya dan membantu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian Sillagan dan Machfoed (2006) dalam Angraheni *et al.* (2010) menguji pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan, keberadaan komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laba dan nilai

perusahaan yang dihitung dengan Tobin's Q. Terbukti bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dewan komisaris independen merupakan proporsi anggota dewan komisaris independen yang ada didalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik. Semakin banyak anggota dewan komisaris independen, maka tingkat integritas pengawasan terhadap dewan direksi yang dihasilkan semakin tinggi, dengan adanya komisaris independen dapat mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat lebih berfokus dalam meningkatkan nilai perusahaan. Bukti empiris mengenai pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Priyatna (2013) bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

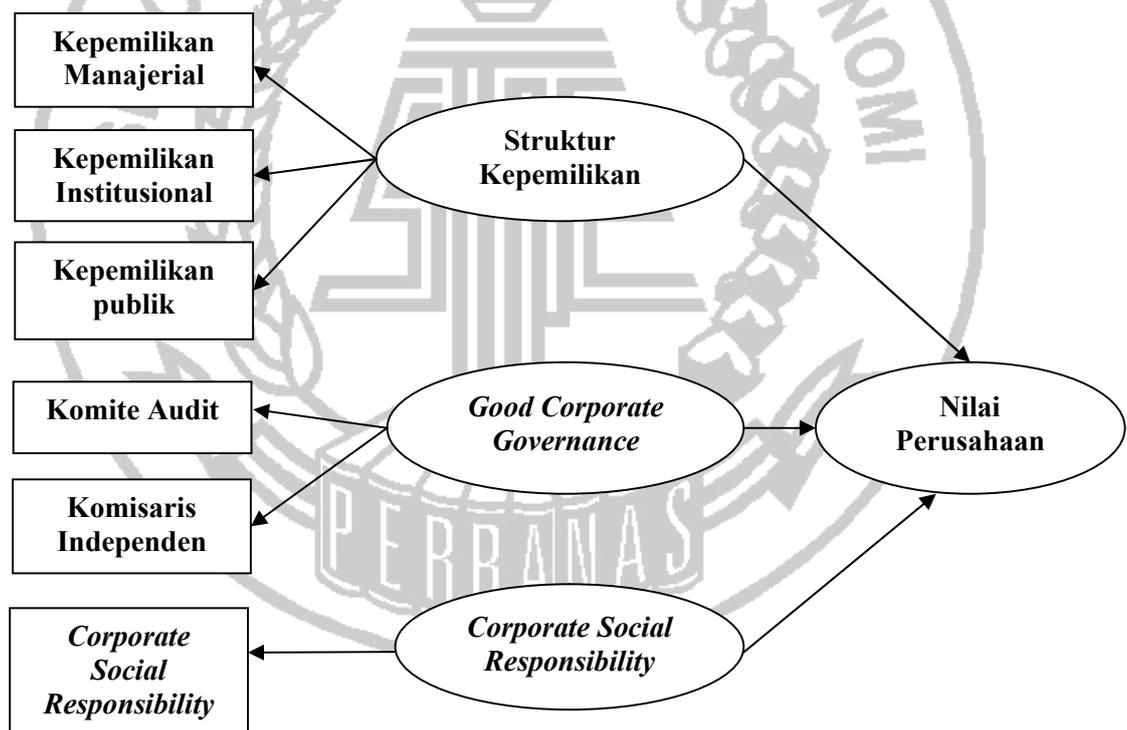
3. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggung jawaban yang di berikan oleh perusahaan terhadap lingkungan di sekitar, maka perusahaan tersebut mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baik citra perusahaan dan loyalitas konsumen semakin tinggi, sehingga dalam waktu lama penjualan perusahaan akan membaik dan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham

perusahaan akan meningkat. Bukti empiris mengenai pengaruh *corporate social responsibility* ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Komang (2013), yang membuktikan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran Skripsi

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan, *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan pada sektor barang konsumsi, penelitian ini ingin menguji apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Dari uraian tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta landasan teori diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

H2 : *Good corporate governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

H3 : *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

